



## Implementasi Program Sistem Informasi Desa Siap (Opensid) di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Muhammad Annas Subakti <sup>1\*</sup>, Tjitjik Rahaju <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: [muhammadannas.21079@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadannas.21079@mhs.unesa.ac.id) <sup>1</sup>, [tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id) <sup>2</sup>

Alamat: Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

Korespondensi penulis: [muhammadannas.21079@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadannas.21079@mhs.unesa.ac.id) \*

**Abstract.** Policy implementation is an effort to realize objectives through operational programs. The Village Government of Siwalan implemented the Village Information System Program (OpenSID) as part of the digital transformation initiated by the Gresik Regency Government under Regent Regulation No. 38 of 2023. This study aims to describe the implementation of OpenSID in Siwalan Village using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using George C. Edward III's policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate several challenges in implementation, particularly in communication, limited human and financial resources, lack of incentives, and the absence of standard operating procedures (SOPs). The study recommends improving communication strategies, developing SOPs, strengthening human resource capacity, providing incentives, and upgrading to the premium version of OpenSID.

**Keywords:** Program Implementation, Siwalan Village, Village Information System (OpenSID).

**Abstrak.** Implementasi kebijakan merupakan upaya merealisasikan tujuan melalui program yang dijalankan. Pemerintah Desa Siwalan mengimplementasikan Program Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) sebagai bagian dari transformasi digital yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi OpenSID di Desa Siwalan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan OpenSID masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek komunikasi, keterbatasan SDM dan anggaran, kurangnya insentif, serta belum tersusunnya SOP. Penelitian merekomendasikan peningkatan strategi komunikasi, penyusunan SOP, penguatan kapasitas SDM, pemberian insentif, dan penggunaan versi premium OpenSID.

**Kata kunci:** Desa Siwalan, Implementasi Program, Sistem Informasi Desa Siap ( OpenSID ).

### 1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik, atau *good governance*, merupakan fondasi penting dalam membangun negara yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Upaya untuk menciptakan tata kelola yang ideal ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi yang efisien dan transparan, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik, serta menjalin kolaborasi dengan masyarakat sipil (Mualif, 2024). Edukasi dan pelatihan diperlukan guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang berintegritas. Sementara itu, penerapan teknologi informasi menjadi salah satu langkah strategis yang mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan

transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada publik (Sisilianingsih *et al.*, 2023; Yulanda dan Adnan, 2023).

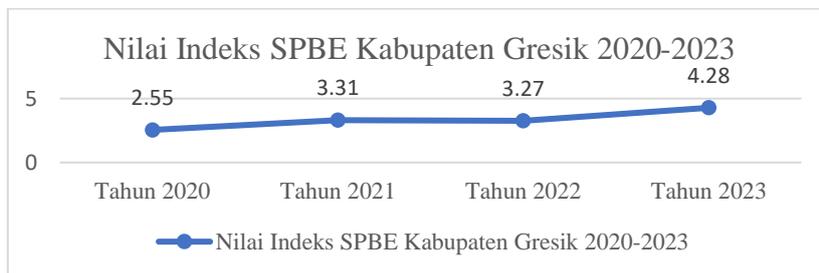
Transformasi digital menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, efisien, dan partisipatif. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perubahan pola kerja birokrasi, percepatan pengambilan keputusan berbasis data, serta penguatan interaksi pemerintah dengan masyarakat melalui platform daring (Hidayat, 2024). Inisiatif digital ini mendorong efisiensi birokrasi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Khairudin *et al.*, 2022). Selain itu, digitalisasi mendukung integrasi data antarinstansi dari pusat hingga daerah, menciptakan sistem yang sinergis dan responsif terhadap persoalan lintas sektor (Wijoyono, 2018). Dalam konteks ini, e-government menjadi pendorong utama birokrasi digital, memperkuat hubungan antara pemerintah dengan warga (government to citizens), pelaku usaha (government to business), dan antarinstansi (government to government) (Ilham, 2022; Diana *et al.*, 2024).

Komitmen Indonesia terhadap digitalisasi pemerintahan tercermin dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai e-government (Ilham, 2022). Implementasi kebijakan ini dilakukan secara terdesentralisasi, menjangkau hingga tingkat daerah (Guntoro, 2021). Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang aktif menjalankan agenda ini melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE dan SK Bupati Nomor 043/305/437.12/2023 mengenai Arsitektur SPBE 2023–2026. Kedua regulasi ini menegaskan upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang digital, transparan, dan kolaboratif (Wismayanti dan Purnamaningsih, 2022). Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan prinsip good governance secara menyeluruh.

Transformasi digital kini menjadi sarana utama dalam mendukung agenda pemerintahan yang responsif dan efisien. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat mengubah pola kerja, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat interaksi dengan masyarakat melalui platform daring yang partisipatif (Hidayat, 2024). Hal ini tidak hanya mendorong efisiensi dan pemangkasan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Khairudin *et al.*, 2022). Selain itu, digitalisasi memungkinkan integrasi data antarinstansi dari tingkat pusat hingga daerah, membentuk sistem pemerintahan yang lebih sinergis dan responsif dalam menyelesaikan persoalan lintas sektor (Wijoyono, 2018). Dalam konteks ini, e-government berperan sebagai penggerak utama digitalisasi birokrasi, menciptakan koneksi yang efektif antara pemerintah

dengan warga negara (*government to citizens*), pelaku usaha (*government to business*), dan antarinstansi (*government to government*) (Ilham, 2022; Diana *et al.*, 2024).

Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap digitalisasi pemerintahan melalui sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai penyelenggaraan e-government (Ilham, 2022). Implementasi kebijakan ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga didorong hingga ke tingkat daerah sebagai bentuk desentralisasi kewenangan (Guntoro, 2021). Salah satu daerah yang aktif dalam penerapan e-government adalah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Surat Keputusan Bupati Nomor 043/305/437.12/2023 mengenai Arsitektur SPBE Tahun 2023–2026, Kabupaten Gresik menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang digital, transparan, dan kolaboratif (Wismayanti dan Purnamaningsih, 2022). Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan teknologi digital menjadi fondasi penting dalam mewujudkan *good governance* secara menyeluruh.



Sumber: diskominfo.gresikkab.go.id, 2024 (diolah)

### **Gambar 1. Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletonik (SPBE) Kabupaten Gresik**

Dari data diatas menunjukkan peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Gresik yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan skor awal 2,55 pada tahun 2020 yang terus naik hingga mencapai 4,28 pada tahun 2023. Peningkatan konsisten ini mencerminkan komitmen Kabupaten Gresik dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen memperluas penerapan e-Government hingga tingkat desa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel (Watrianthos *et al.*, 2019). Sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 86, desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi desa yang disediakan pemerintah daerah. Untuk

itu, diluncurkan Program Desa Siap yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD dan diperkuat oleh Perbup No. 38 Tahun 2023. Program ini bertujuan membangun tata kelola digital desa melalui empat pilar: digitalisasi layanan, integrasi data pembangunan, SDGs Desa, dan peningkatan kapasitas aparatur. DPMD sebagai pelaksana utama bekerja sama dengan Diskominfo dan Dispendukcapil guna mendukung sistem informasi dan integrasi data desa.

Sebagai bentuk konkret implementasi digitalisasi desa, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Diskominfo bekerja sama dengan Perkumpulan Desa Digital Terbuka untuk menerapkan sistem *OpenSID* sebagai platform utama Sistem Informasi Desa Siap. Kerja sama ini diresmikan melalui kesepakatan Nomor 14/02/DDT/I/2023. *OpenSID* adalah sistem berbasis *open source* yang mendukung tata kelola desa berbasis data, transparan, dan efisien. Melalui platform ini, desa dapat mengelola administrasi kependudukan, pelayanan publik, hingga perencanaan pembangunan secara lebih mandiri. *OpenSID* juga hadir dalam dua versi yaitu umum dan premium, dengan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Kehadiran sistem ini memperkuat peran desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap era digital sekaligus mendorong kemajuan desa secara inklusif dan berkelanjutan.

Desa Siwalan di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, telah memanfaatkan Sistem Informasi Desa Siap (*OpenSID*) versi umum sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam tata kelola desa. Namun, pemanfaatan sistem ini belum optimal karena beberapa pertimbangan. Salah satu alasan utamanya adalah belum adanya instruksi tegas dari pemerintah daerah terkait kewajiban penggunaan versi premium *OpenSID*, yang memiliki fitur lebih lengkap. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama karena biaya untuk peningkatan sistem tidak dianggarkan dalam APBDes. Padahal, dari sisi infrastruktur seperti akses internet dan perangkat komputer di kantor desa, Desa Siwalan sebenarnya sudah memiliki kesiapan teknis yang memadai.

Meski sistem telah diterapkan, pelaksanaannya masih belum maksimal. *OpenSID* belum digunakan secara efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik, seperti dalam hal pemutakhiran data penduduk, penyampaian program desa, maupun pelayanan administrasi secara daring. Berdasarkan pengamatan langsung terhadap situs web resmi *OpenSID* Desa Siwalan, masih ditemukan berbagai kekurangan, seperti data yang belum diperbarui, fitur yang tidak berfungsi, serta tampilan yang kurang informatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur tersedia, sistem informasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.



Sumber: Website Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) Desa Siwalan

**Gambar 2. Tampilan Website Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) Desa Siwalan Pada Bagian Sub Menu Statistik Desa**

Gambar tersebut menunjukkan ketidaklengkapan data administratif Desa Siwalan, khususnya pada sub-menu statistik desa di website OpenSID, di mana beberapa RT masih memiliki kolom data yang kosong. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan data belum optimal dan perlu ditingkatkan agar sistem mencerminkan kondisi riil di lapangan.



Sumber: Website Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) Desa Siwalan

**Gambar 3. Tampilan Website Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) Desa Siwalan Pada Bagian Sub Menu Layanan**

Gambar tersebut menunjukkan layanan akta kelahiran di website OpenSID Desa Siwalan yang belum berfungsi optimal. Sub-menu hanya menyajikan informasi persyaratan tanpa fitur interaktif untuk pengurusan daring, menandakan pemanfaatan sistem masih terbatas.



Sumber: Website Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) Desa Siwalan

**Gambar 3. Tampilan Website Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) Desa Siwalan Pada Bagian Sub Menu Statistik Desa**

Gambar di atas menunjukkan kesalahan pada sub-menu profil desa di website OpenSID Desa Siwalan, di mana visi dan misi yang ditampilkan milik Desa Kemangi. Hal ini mencerminkan kurangnya validasi data sehingga informasi tidak sesuai dengan identitas desa.

Tampilan beberapa indikator pada sistem OpenSID Desa Siwalan menunjukkan masih adanya kekurangan dalam implementasinya. Hal ini mencakup keterbatasan fitur akibat penggunaan versi umum, data yang belum diperbarui, serta adanya kesalahan informasi di dalam sistem. Kendala tersebut terjadi karena tantangan dalam aspek teknis maupun non-teknis, seperti keterbatasan sumber daya anggaran, kurangnya validasi data, dan rendahnya optimalisasi penggunaan sistem akibat beban kerja perangkat desa yang belum terfokus pada pengelolaan sistem informasi. Meskipun infrastruktur dasar seperti akses internet dan perangkat komputer telah tersedia, sistem belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pelayanan publik desa.

Penerapan OpenSID di Desa Siwalan sejatinya bertujuan untuk mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan efisien. Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan masih menghalangi tercapainya tujuan tersebut secara optimal. Terbatasnya versi sistem, kurangnya pemanfaatan fitur yang tersedia, serta belum adanya komitmen penuh dalam pengelolaan data menjadi isu utama. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi Program Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara alamiah dan menyeluruh, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara menyeluruh dan mendalam dalam konteks yang alami. Menurut Sugiyono (dalam Silkyanti, 2019), pendekatan kualitatif dilakukan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, menurut Punaji (dalam Nazir, 2016), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Penelitian ini difokuskan pada teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana OpenSID dijalankan secara optimal dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Siwalan dalam proses implementasinya. Lokasi penelitian dipilih karena meskipun Kabupaten Gresik telah menerima penghargaan dalam bidang digitalisasi, pelaksanaan OpenSID di tingkat desa dinilai belum berjalan maksimal.

Menurut Sugiyono (2008:165), teknik pengumpulan data adalah serangkaian aktivitas atau cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purposive, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi terhadap dokumen pendukung seperti panduan teknis, laporan kegiatan, dan arsip digital. Informan terdiri dari kepala desa, operator OpenSID, warga sebagai penerima layanan, serta pihak-pihak pendukung seperti Dinas PMD, Diskominfo, dan OpenDesa. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber serta dilakukan *member check* kepada informan terkait.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Program Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan**

Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) merupakan bagian dari Program Desa Siap yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, efisien, transparan, dan berbasis digital. Program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa, mempermudah pemutakhiran data kependudukan, serta mempercepat pelayanan publik berbasis teknologi. Melalui sistem ini, desa di Kabupaten Gresik diharapkan mampu mengelola administrasi secara mandiri dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi pemerintahan desa, integrasi data yang lebih baik juga mendukung penyusunan kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah dan berbasis data. Sistem ini mencakup rangkaian fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang saling terintegrasi sebagai fondasi transformasi digital dalam pengelolaan data dan pembangunan desa.

Pelaksanaan OpenSID didasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya transformasi digital pelayanan publik, integrasi data tata kelola desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Dalam regulasi tersebut, peran kelembagaan juga diatur secara jelas, di mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab dalam koordinasi kebijakan dan pendampingan pemerintah desa, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola pengembangan teknis serta integrasi data sistem. Dukungan kelembagaan ini diperkuat dengan kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan organisasi pengembang OpenSID, yakni Perkumpulan Desa Digital Terbuka, yang menyediakan platform open source untuk mendukung pengelolaan administrasi desa secara modern, inklusif, dan berkelanjutan.

OpenSID tersedia dalam dua versi, yaitu versi umum yang gratis dengan fitur dasar, dan versi premium yang berbayar dengan fitur lebih lengkap, tampilan modern, keamanan data yang lebih kuat, dan kemampuan integrasi dengan layanan eksternal. Pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi desa untuk menyesuaikan penggunaan sistem sesuai kebutuhan dan anggaran. Sistem ini memiliki berbagai menu utama seperti Bantuan untuk pencatatan distribusi bantuan sosial, Pertanahan untuk pengelolaan data tanah desa, Pembangunan untuk pemantauan proyek desa, Lapak sebagai fitur marketplace desa, serta Pemetaan untuk visualisasi digital wilayah desa. Dengan fitur-fitur tersebut, OpenSID membantu pemerintah desa menjalankan administrasi secara efisien, transparan, dan terorganisir sekaligus meningkatkan layanan publik kepada masyarakat desa.

## **Implementasi Program Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) Di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Mengacu Pada Model Implementasi Kebijakan Publik Yang Dikemukakan Oleh George C. Edward III**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan, menurut Edward III (dalam Widodo, 2010), merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Kabupaten Gresik, komunikasi memainkan peran sentral dalam menjembatani koordinasi antarinstansi, khususnya antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pengawal kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penyedia sistem digital, dan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan. Kolaborasi ini juga melibatkan Perkumpulan Desa Digital Terbuka (OpenDesa), yang berperan dalam penyediaan dan pengembangan sistem OpenSID. Keberhasilan komunikasi dalam implementasi ini

ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni transmisi informasi secara tepat dari pembuat kebijakan ke pelaksana, kejelasan isi komunikasi agar dapat dipahami dengan baik oleh perangkat desa, serta konsistensi penyampaian informasi guna menjaga keberlanjutan dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan sistem di lapangan.

#### a. Dimensi Transmisi

Transmisi merupakan proses penyebaran informasi kebijakan kepada pelaksana program. Dalam hal ini, DPMD bersama Diskominfo menyampaikan informasi kebijakan kepada desa sebagai pelaksana dalam penerapan Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID).

Proses transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan telah berlangsung melalui kerja sama antara instansi pemerintah yang berwenang. Penyampaian informasi kebijakan dilakukan melalui berbagai tahapan seperti sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaksana di tingkat desa. Kegiatan ini bertujuan agar pelaksana kebijakan memahami secara teknis dan substantif implementasi sistem, sehingga dapat diterapkan dengan optimal di lingkungan pemerintahan desa. Selain itu, komunikasi dua arah juga dibangun melalui grup komunikasi daring, seperti WhatsApp dan Telegram, untuk mempercepat penyampaian informasi, diskusi teknis, serta solusi atas kendala yang muncul selama proses implementasi.



Sumber: Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik,  
2025

#### **Gambar 4. Sosialisasi OpenSID kepada Pemerintah Desa**

Meskipun komunikasi dari instansi terkait kepada pelaksana kebijakan di tingkat desa berjalan cukup aktif dan sistematis, penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal. Tidak adanya forum sosialisasi atau bentuk komunikasi langsung kepada warga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan manfaat dari sistem yang

telah diterapkan. Informasi mengenai sistem tersebut hanya diperoleh sebagian warga secara tidak langsung, seperti saat berinteraksi dengan perangkat desa dalam mengurus administrasi atau melalui percakapan informal. Minimnya komunikasi dari pelaksana kepada masyarakat mencerminkan belum optimalnya upaya penyebaran informasi publik pada tahap implementasi kebijakan.

Dalam konteks dimensi transmisi kebijakan, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh tersampainya informasi kepada pelaksana, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai pihak yang akan menggunakan dan merasakan dampaknya. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi menyebabkan pemanfaatan sistem belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana kebijakan di tingkat desa untuk meningkatkan upaya komunikasi publik melalui berbagai kanal yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan efektif. Tanpa adanya perluasan komunikasi ini, tujuan utama dari digitalisasi layanan desa untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan partisipatif belum sepenuhnya dapat tercapai.

#### **b. Dimensi Kejelasan**

Dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan menekankan pentingnya penyampaian informasi yang tepat dan terarah kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan, diketahui bahwa penyampaian informasi masih menemui sejumlah kendala. Regulasi yang dijadikan dasar pelaksanaan, yakni Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023, dinilai masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan aturan turunan yang bersifat teknis. Akibatnya, pelaksana di tingkat desa mengalami kebingungan dalam memahami substansi kebijakan, terutama dalam menentukan model sistem yang akan digunakan antara versi standar (gratis) dan premium (berlangganan). Minimnya instruksi teknis yang jelas turut mempersulit proses implementasi kebijakan di lapangan, meskipun sosialisasi telah dilakukan. Informasi yang disampaikan kerap kali tidak sesuai dengan versi sistem yang digunakan oleh desa, sehingga menimbulkan keraguan dalam mengambil langkah yang tepat.

Tidak hanya pada pelaksana di tingkat desa, ketidakjelasan informasi kebijakan ini juga berdampak hingga ke masyarakat sebagai penerima manfaat. Pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan penggunaan sistem ini masih sangat rendah karena kurangnya sosialisasi serta minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa.

Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat memanfaatkan sistem secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga menghambat efektivitas implementasi di tingkat desa. Dengan demikian, diperlukan kejelasan regulasi yang lebih teknis serta strategi penyampaian informasi yang lebih menyeluruh dan spesifik, agar kebijakan Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) dapat dipahami secara menyeluruh dan diterapkan dengan optimal oleh seluruh pihak yang terlibat.

### c. Dimensi Konsistensi

Dalam dimensi konsistensi komunikasi kebijakan, keselarasan informasi antar pihak yang terlibat memegang peran penting dalam kelancaran implementasi. Dalam penerapan kebijakan Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID), terdapat pembagian peran antara instansi yang menyampaikan substansi kebijakan dan instansi yang bertanggung jawab pada aspek teknis. Namun, dalam praktiknya, ditemukan ketidakkonsistenan dalam penyampaian petunjuk teknis yang diberikan kepada pelaksana di tingkat desa. Informasi teknis yang diterima bersifat terpisah-pisah dan tidak terkoordinasi dengan baik, serta mencampurkan antara versi sistem yang berbeda tanpa penjelasan yang memadai. Ketidakteraturan ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan dan menyebabkan hambatan dalam pemanfaatan sistem secara optimal.



Sumber: Pemerintah Desa Siwalan, 2025

### Gambar 5. Petunjuk Teknis Penggunaan Fitur OpenSID

Ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi teknis berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi di lapangan. Pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan penggunaan sistem dengan petunjuk yang diberikan, karena tidak adanya kejelasan terkait sistem yang digunakan. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna akhir turut merasakan dampaknya, karena belum dapat mengakses informasi desa secara menyeluruh maupun memanfaatkan layanan digital yang dijanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa inkonsistensi komunikasi

kebijakan tidak hanya berpengaruh pada proses administrasi internal, tetapi juga menghambat capaian manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat luas.

## 2. Sumber Daya

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010), sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai mendukung keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan, sedangkan keterbatasannya menjadi hambatan. Dalam konteks implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID), indikator sumber daya mencakup ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan dari pihak terkait, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sistem yang telah dirancang dan dikomunikasikan dengan baik tetap memerlukan tenaga pelaksana yang kompeten agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Staf pelaksana di tingkat desa, terutama operator sistem, menjadi aktor kunci dalam mengoperasionalkan kebijakan ini. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada struktur kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapabilitas individu yang menjalankan sistem di lapangan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memahami teknologi dan memiliki keterampilan yang memadai, sistem informasi desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi sumber daya manusia di tingkat desa menunjukkan keberagaman latar belakang pendidikan, mulai dari lulusan SMA hingga perguruan tinggi dengan jurusan yang tidak selalu relevan dengan pengelolaan sistem informasi. Sebagian aparat desa senior yang berlatar belakang pendidikan menengah atas mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi.

**Tabel 1. Data Perangkat Desa Siwalan**

No	Nama Perangkat Desa	Jabatan	Operator Aplikasi
1	Moh. Roqib	Sekretaris Desa	SIPADES
2	Sumainah	Kaur Keuangan	-
3	Najwatul Umadah	Kaur Perencanaan	SIPD
4	Ma'rifatus Sa'diyah	Kaur TU Umum	SID, e-HDW

5	Irma Shofiana	Kasi Pelayanan	SIMANIS, SISKEUDES, Gresik Kerja
6	Ahmad Syaihun	Kasi Pemerintahan	-
7	Cholib Nanang Fitoni	Kasi Kesra	PRODESKEL, SIKS-NG, DDC, EPDESKEL
8	Faroj Is Fahami	Kasun Bejan	-

Sumber: Pemerintah Desa Siwalan 2025

Kondisi sumber daya manusia di Pemerintah Desa Siwalan yang beragam dari segi pendidikan dan kemampuan teknologi menjadi tantangan dalam implementasi OpenSID. Mayoritas perangkat desa kurang akrab dengan teknologi, sementara yang menguasai justru telah dibebani tugas lain. Pengelolaan sistem hanya dilakukan oleh satu operator yang juga merangkap jabatan dan mengelola aplikasi lain, menyebabkan keterlambatan input data dan fitur sistem tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, informasi desa belum tersedia secara lengkap dan terkini, yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan implementasi OpenSID sangat bergantung pada kesiapan, distribusi tugas, dan dukungan terhadap operator agar sistem dapat berjalan efektif.

#### **b. Sumber Daya Anggaran**

Dalam implementasi kebijakan publik, anggaran memegang peran penting sebagai penentu keberhasilan program, termasuk dalam penerapan Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan, Kabupaten Gresik. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan tersedianya infrastruktur dasar seperti komputer dan internet, yang sebagian besar didanai melalui APBDesa. Sementara itu, aspek teknis seperti pelatihan, pemeliharaan sistem, dan integrasi data didukung oleh APBD melalui instansi terkait di tingkat kabupaten. Pengadaan komputer baru pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya konkret dari pemerintah desa untuk memfasilitasi pelaksanaan OpenSID. Namun, keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan, terutama dalam pengembangan lanjutan seperti peningkatan ke versi premium sistem, yang hingga saat ini belum dianggarkan.

Meskipun kebutuhan dasar telah terpenuhi, keberlangsungan dan optimalisasi sistem belum sepenuhnya terjamin. Operator sistem hanya mengandalkan fasilitas yang

ada dan menghadapi keterbatasan dalam operasional harian. Selain itu, masyarakat menyadari bahwa pengadaan perangkat saja belum cukup untuk menjamin efektivitas layanan digital desa. Sistem informasi memerlukan pembaruan dan pengembangan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ketiadaan alokasi anggaran untuk peningkatan fitur menjadi salah satu hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik digital di desa, sehingga penguatan dukungan anggaran jangka panjang menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan ini.

### **3. Disposisi**

Menurut George C. Edward III (dalam Widodo, 2010) dan Maksum & Rahaju (2018), disposisi pelaksana merupakan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan terhadap kebijakan, yang mencerminkan pemahaman, motivasi, serta keyakinan atas manfaat kebijakan tersebut. Disposisi positif akan mendorong keberhasilan implementasi, sementara sikap negatif dapat menjadi hambatan. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh sikap aparatur desa. Pemahaman dan sikap proaktif akan mendukung optimalisasi sistem, sedangkan penolakan atau apatisme dapat menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembinaan sikap dan motivasi pelaksana menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

#### **a. Pengangkatan Birokrasi**

Dalam implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan, pengangkatan operator sistem dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Penunjukan dilakukan oleh kepala desa melalui surat keputusan, dengan fokus pada individu yang memiliki latar belakang administrasi dan kemampuan komputer memadai, sehingga mendukung kelancaran operasional sistem. Pendampingan dan pelatihan diberikan oleh instansi terkait untuk memastikan operator mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pemilihan operator ini juga mendapat dukungan dari masyarakat karena dianggap tepat dan relevan dengan kebutuhan teknis dan efisiensi pemerintahan desa.

Meski pengangkatan birokrasi di tingkat desa sudah berjalan optimal, masih terdapat kekurangan berupa belum adanya pedoman teknis standar dari pemerintah kabupaten mengenai kriteria operator sistem. Hal ini berpotensi menyebabkan ketimpangan kualitas pelaksanaan OpenSID di berbagai desa, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah kabupaten menyusun pedoman teknis sebagai acuan dalam proses

pengangkatan operator, guna menciptakan standarisasi dan keseragaman implementasi kebijakan digital di seluruh desa.

#### **b. Insentif**

Dimensi insentif dalam implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi motivasi dan kinerja pelaksana kebijakan. Meskipun pemerintah desa telah menganggarkan insentif melalui APBDesa sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab teknis operator, realisasinya belum terlaksana karena alokasi dana dialihkan untuk kebutuhan operasional lain. Kondisi ini menyebabkan operator tidak menerima insentif yang seharusnya dapat meningkatkan semangat dan mempertahankan kinerja dalam mengelola sistem.

Ketiadaan insentif berdampak pada beban kerja operator yang semakin berat tanpa adanya penghargaan yang setimpal, sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan sistem. Dampak tersebut juga dirasakan oleh masyarakat, yang menyadari lambatnya pembaruan informasi akibat menurunnya semangat kerja operator. Hal ini menunjukkan bahwa insentif memegang peranan krusial dalam menjaga kualitas pelayanan dan keberlangsungan implementasi kebijakan digital di tingkat desa.

### **4. Struktur Birokrasi**

Menurut George C. Edward III (dalam Widodo, 2010), struktur birokrasi mencakup susunan, mekanisme kerja, dan prosedur operasional kebijakan, di mana struktur yang efisien dan terkoordinasi mendukung keberhasilan implementasi. Penelitian Sormin (2021) dan Kogoya et al. (2024) menunjukkan bahwa struktur yang tidak responsif dan pembagian peran yang tidak jelas menghambat program. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SOP, kejelasan tugas, dan koordinasi antara desa dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang sederhana dan jelas menjadi kunci efektivitas pelaksanaan OpenSID.

#### **a. Standar Operasional Prosedur**

Struktur birokrasi dalam implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan masih menghadapi kendala yang cukup mendasar, terutama karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat formal dan aplikatif. Meskipun beberapa pedoman umum dan tutorial teknis telah disediakan, hal tersebut belum mampu menggantikan fungsi SOP sebagai panduan utama dalam pelaksanaan

sistem di tingkat desa. Akibatnya, pelaksanaan tugas dilakukan dengan pendekatan improvisasi dan adaptasi pribadi tanpa standar kerja yang baku. Situasi ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan langkah teknis yang tepat dan parameter evaluasi keberhasilan implementasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Prabawati et al. (2018), yang menyatakan bahwa “struktur birokrasi yang baik seharusnya memiliki perangkat aturan dan tata kelola yang jelas agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai harapan.” Ketiadaan SOP mengindikasikan bahwa kesiapan sistem administratif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan masih perlu diperkuat.

Selain memengaruhi pelaksana kebijakan di tingkat internal pemerintahan desa, ketidakhadiran SOP juga berdampak langsung terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. Tidak adanya dokumen petunjuk atau tata cara penggunaan sistem membuat masyarakat kebingungan ketika ingin mengakses informasi desa secara mandiri melalui OpenSID. Akibatnya, tujuan utama dari implementasi sistem ini untuk mendorong transparansi, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Menurut Asyik et al. (2021), “keberadaan SOP menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan, karena memberikan arahan yang jelas kepada pelaksana mengenai prosedur yang harus dijalankan.” Dengan demikian, diperlukan inisiatif segera dari pihak terkait untuk menyusun SOP yang komprehensif, terstandarisasi, dan mudah dipahami guna memperkuat struktur birokrasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) secara berkelanjutan.

#### **b. Fragmentasi**

Implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan, Kabupaten Gresik, masih menghadapi hambatan pada aspek fragmentasi birokrasi, khususnya dalam pembagian peran dan keterlibatan perangkat desa. Meskipun secara formal Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 telah mengatur struktur tanggung jawab, pelaksanaannya belum mencerminkan prinsip kerja yang kolektif dan terdistribusi dengan baik. Pelaksanaan sistem di lapangan masih sangat bergantung pada peran operator desa, sementara perangkat lainnya belum menunjukkan keterlibatan aktif. Operator bertugas menangani hampir seluruh proses input, validasi, dan pembaruan data secara mandiri, sedangkan perangkat lain cenderung hanya menyerahkan data mentah tanpa memahami alur kerja sistem. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi OpenSID belum terintegrasi ke dalam pola kerja seluruh perangkat desa secara menyeluruh.

Ketidakterlibatan aktif perangkat desa dalam pengelolaan sistem digital berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat masih mengandalkan satu orang, yakni operator desa, untuk seluruh kebutuhan informasi digital. Ketergantungan ini tidak hanya menambah beban kerja operator, tetapi juga menandakan kurangnya pemahaman dan kapasitas teknis dari perangkat lain dalam mengoperasikan OpenSID. Seperti dijelaskan oleh Rampengan et al. (2018), “fragmentasi yang tidak efektif akan menghambat implementasi kebijakan karena lemahnya sinergi antar pelaksana di tingkat lokal.” Dengan demikian, OpenSID yang seharusnya menjadi sistem informasi desa berbasis digital dan partisipatif, belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum melibatkan semua unsur secara merata dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan belum mencapai potensi optimal dikarenakan berbagai hambatan yang meliputi ketidakjelasan SOP, fragmentasi birokrasi, batasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Ketidakterpaduan informasi dan ketidakseragaman dalam penyampaian petunjuk teknis turut memperlemah proses adaptasi dan pemanfaatan sistem secara menyeluruh. Meskipun fitur dan infrastruktur dasar telah tersedia, faktor-faktor tersebut menyebabkan sistem berjalan kurang efisien dan belum mampu memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat serta efisiensi layanan pemerintah desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sistem informasi desa sangat bergantung pada penguatan aspek kebijakan internal, seperti penyusunan SOP yang jelas, koordinasi yang lebih baik antar perangkat desa dan lembaga terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan anggaran yang berkelanjutan dan strategi sosialisasi yang efektif juga menjadi faktor kunci agar sistem dapat berjalan secara konsisten, transparan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

##### **Saran**

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pihak terkait segera menyusun SOP yang jelas dan terstandarisasi, meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat

desa serta masyarakat, dan mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan untuk pengembangan sistem. Penting juga dilakukan penyelarasan informasi teknis dan memberi panduan penggunaan versi sistem yang berbeda agar tidak menimbulkan kebingungan. Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas sistem, perbaikan dalam pengelolaan data dan penggunaan fitur secara lebih maksimal harus terus didorong. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali aspek persepsi masyarakat, dampak sosial, serta model implementasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik desa lain agar manfaat dari sistem ini dapat lebih optimal dan merata.

## DAFTAR REFERENSI

- Agus Diana, B., Sunarya, A., & Harta, R. (2024). Kajian Pelaksanaan E-Government Pada Pemerintahan Desa Citallem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 181–194. <https://doi.org/10.37329/Ganaya.V7i1.3032>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Mf6bdlj8qryc&oi=fnd&pg=PA3&dq=Akuntabilitas+Dan+Transparansi+Dana+Bantuan&ots=Eamy321xj7&sig=Gwth9f6gcuur8zcoytf1qkpoitc>
- Hidayat, E. W. (2024). Volume 23 Nomor 2 *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*. 23(August 2024).
- Ilham, B. A. (2022). Sistem Informasi Manajemen (Sim) Sebagai Sarana Pencapaian E-Government. *Jurnal Stie Semarang*, 14(2), 184–195. <https://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/download/564/382/>
- Kadek Wiwin Dwi Wismayanti & Eka Putu Purnamaningsih. (2022). Penerapan Pelayanan Publik Berbasis. 05(01), 45–56.
- Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah. (2022). Membangun Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran Good Governance Dan E-Government. In C Amerta Media. <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/monograf/catalog/book/74>
- Kogoya, Y., Togodly, A., Tingginehe, R. M., Ruru, Y., & Bouway, D. (2024). Evaluation Of Policy Implementation (G. Edward III Theory) On The Stunting Prevention And Treatment Program At Waena Health Center, Jayapura City Papua Province. *Formosa Journal Of Science And Technology (FJST)*, 3(2), 233–246. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst>
- Maksum, A., & Rahaju, T. (2018). Implementasi Program Desa Melangkah Di Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Publika*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/24519%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/24519/22440>

- Mualif. (2024). Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ).
- Muhammad Fandy Asyik, I Nyoman Sumaryadi, & Deti Mulyati. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (Sapk) Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.54783/Jv.V13i1.369>
- Nazir, M. A. (2016). Describing Consumer's Desire To Share Positive Information (Positive WOM) Based On The Experience Stayed At Hotel Sahid Montana Dua. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol 5, No.
- Prabawati, I., Sos, S., Si, M., Publik, J. A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2018). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission ( Oss ) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Dpmpstp ) Kabupaten Nganjuk Anis Nur Fadhillah S1 Ilmu Administrasi Negara , Fakul.
- Rampengan, B. R., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2018). Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(53).
- Silkyanti, F. (2019). Analisis Peran Budaya Sekolah Yang Religius Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Indonesian Values And Character Education Journal*, 2(1), 36. <https://doi.org/10.23887/Ivcej.V2i1.17941>
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., & Purwaningsih, M. (2023). Analisis Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Di Era Pandemi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(4), 883–892. <https://doi.org/10.25126/Jtiik.2024107059>
- Sormin, R. (2021). The Effect Of Communication, Resources, Disposition And Structure Of Bureaucracy On Medical Participation Of Men's Operations In City Of Bandar Lampung (Study Of George Edward III Policy Implementation Model). *International Journal For Innovation Education And Research*, 9, 323–338. <https://doi.org/10.31686/Ijier.Vol9.Iss7.3254>
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Syaifullah, M. (2019). Model E-Government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(1), 53–60. <https://doi.org/10.34010/Miu.V17i1.2239>
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Yulanda, A., & Fachri Adnan, M. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 1(3), 103–110. <https://isora.tpublishing.org/index.php/isora>